

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial di era modern, lembaga kepolisian memegang peranan yang sangat krusial sebagai penyelenggara hukum yang bertanggung jawab atas pengamanan, ketenteraman, dan stabilitas dalam masyarakat. Kepolisian berfungsi tidak hanya sebagai lembaga resmi pemerintah, tetapi juga sebagai representasi kekuasaan dan legitimasi dalam menjaga ketertiban sosial. Sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan teratur, yang pada gilirannya mendukung kelangsungan hidup masyarakat serta pembangunan nasional. Keberadaan kepolisian menjadi elemen penting dalam mempertahankan keteraturan sosial, karena institusi ini berfungsi dalam menegakkan norma hukum dan memberikan perlindungan kepada warga.

Dalam lingkungan masyarakat kota di Indonesia, pekerjaan sebagai petugas kepolisian merupakan salah satu profesi yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang cukup besar. Menjadi bagian dari lembaga kepolisian tidak hanya memberikan keamanan finansial lewat gaji tetap dan jaminan karier, tapi juga memberikan posisi sosial dan pengakuan yang tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini menjadikan pekerjaan kepolisian sebagai salah satu jalan untuk mencapai mobilitas sosial vertikal yang banyak diminati, terutama oleh generasi muda (Pramudya, 2023). Pekerjaan di kepolisian dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi seseorang, terutama di lingkungan perkotaan yang memiliki tingkat persaingan sosial yang tinggi.

Fenomena ini juga dapat diamati di daerah Cipinang, Jakarta Timur, yang merupakan salah satu kawasan urban dengan karakteristik sosial yang beragam dan memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Cipinang adalah area pemukiman yang padat penduduknya dengan masyarakat yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang bervariasi. Keadaan sosial ini menciptakan suasana sosial yang kompetitif, di mana setiap individu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil serta memiliki status sosial yang tinggi,

termasuk dalam hal menjadi anggota kepolisian. Dalam hal ini, proses seleksi untuk menjadi anggota kepolisian tidak hanya dilihat sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai faktor sosial, seperti jaringan sosial dan relasi antarpribadi yang dimiliki oleh individu.

Secara resmi, tahapan pemilihan anggota kepolisian dilakukan dengan berpegang pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengikuti tahapan pemilihan, berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi, di dalam kenyataan sosial, proses seleksi sering kali tidak dianggap sepenuhnya netral dan objektif. Dalam masyarakat, ada pandangan bahwa jaringan sosial dan relasi tertentu bisa memberikan keuntungan bagi individu dalam tahapan pemilihan. Pandangan ini menunjukkan bahwa faktor sosial berperan signifikan dalam memengaruhi kesempatan individu untuk mendapatkan akses ke institusi yang resmi.

Dalam pandangan sosiologi, fenomena ini dapat dilihat melalui istilah kapital sosial. Kapital sosial adalah semua sumber daya yang diperoleh oleh seseorang dari jaringan relasi sosial yang dimilikinya. (Press, 2009) menyatakan bahwa kapital sosial adalah sumber dayanya yang ada dalam interaksi sosial yang dapat digunakan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, (Bourdieu, 1986) mengungkapkan bahwa kapital sosial meliputi sumber daya yang nyata dan yang berpotensi, yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan relasi sosial yang dapat memberikan keuntungan bagi individu di dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam konteks pemilihan anggota kepolisian, kapital sosial dapat menawarkan akses kepada informasi, dukungan sosial, serta kesempatan tertentu yang membantu individu dalam melalui proses seleksi.

Kapital sosial bisa terbentuk melalui berbagai jenis interaksi sosial, seperti hubungan antar anggota keluarga, teman, atau koneksi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki jaringan sosial yang luas mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh informasi dan peluang dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jaringan sosial yang cukup. Dalam situasi seleksi kepolisian, kapital

sosial dapat memberikan informasi terkait proses seleksi, teknik persiapan, serta dukungan dari orang-orang di sekitar yang bisa membantu individu dalam menjalani proses seleksi tersebut.

Selain itu, dinamika sosial dalam masyarakat juga menunjukkan berbagai contoh penipuan serta praktik percaloan yang berhubungan dengan proses pemilihan anggota kepolisian. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh *The Jakarta Post* (2017) mengungkap bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjelaskan adanya praktik suap dalam rekrutmen anggota kepolisian dengan bukti dana mencapai Rp4,7 miliar. Kasus ini melibatkan individu internal kepolisian yang diduga menerima sejumlah uang dari calon peserta atau keluarga mereka dengan imbalan janji kelulusan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem seleksi dirancang untuk transparan, dalam praktiknya, masih ada peluang penyimpangan yang memanfaatkan posisi struktural dan hubungan kekuasaan dalam institusi tersebut.

Tidak hanya itu, praktik penipuan dalam proses rekrutmen kepolisian juga terjadi di berbagai wilayah. Berdasarkan berita yang dimuat oleh *Jakarta Daily* (2023), beberapa korban melaporkan telah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah dijanjikan kelulusan melalui cara tidak resmi. Para pelaku umumnya mengklaim memiliki koneksi dengan pejabat atau anggota aktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan meyakinkan korbannya bahwa jaringan tersebut dapat mempengaruhi hasil seleksi. Meskipun akhirnya terbukti bahwa kasus-kasus tersebut merupakan penipuan, kemampuan pelaku meyakinkan korban menunjukkan adanya pandangan sosial yang kuat bahwa hubungan dan koneksi memiliki peran penting dalam proses seleksi.

Lebih lanjut, laporan dari *VOI News* (2023) juga mengungkap keterlibatan beberapa oknum kepolisian dalam praktik percaloan rekrutmen. Para oknum tersebut menawarkan janji kelulusan kepada calon peserta dan kemudian dikenakan sanksi disiplin oleh institusi. Fakta bahwa pelanggaran ini terjadi di dalam struktur organisasi menunjukkan bahwa hubungan personal dan posisi struktural dapat disalahgunakan untuk menciptakan akses yang tidak seimbang dalam proses seleksi.

Rangkaian kasus ini tidak hanya mencerminkan praktik penyimpangan yang bersifat individual, tetapi juga menunjukkan bahwa kepercayaan sosial terhadap “jalur orang dalam” masih sangat kuat di masyarakat. Kepercayaan ini muncul karena asumsi bahwa individu yang memiliki hubungan dekat dengan aparat kepolisian, atau yang berada dalam jaringan tertentu, memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima. Dalam konteks ini, hubungan sosial dianggap tidak hanya sebagai interaksi antarindividu, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diubah menjadi keuntungan strategis.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa dalam kehidupan sosial, ada pandangan di masyarakat bahwa jaringan sosial dan hubungan tertentu bisa memberikan keuntungan dalam seleksi anggota kepolisian. Pandangan ini menunjukkan bahwa modal sosial memainkan peran krusial dalam memengaruhi kesempatan individu untuk mendapatkan akses ke institusi formal. Modal sosial bukan hanya berfungsi sebagai sumber daya yang membuka akses terhadap informasi, tetapi juga sebagai sumber daya yang bisa memberikan dukungan sosial yang membantu individu mencapai tujuan tertentu.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa modal sosial memainkan peran yang signifikan dalam konteks lembaga kepolisian. Studi yang dilakukan oleh (Adisatria, 2024) mengungkapkan bahwa modal sosial berperan penting dalam memperkuat interaksi sosial, meningkatkan efisiensi organisasi, serta mendukung kinerja tenaga kerja di lembaga kepolisian. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh besar terhadap kesempatan individu dalam mendapatkan akses ke posisi tertentu dalam struktur sosial, termasuk dalam konteks seleksi lembaga formal (Rachmawati dan Handayani, 2020).

Dalam lingkungan perkotaan seperti Cipinang, kapital sosial merupakan elemen krusial yang dapat memengaruhi kesempatan seseorang dalam mendapatkan akses ke lembaga formal, seperti kepolisian. Jaringan sosial yang dimiliki seseorang dapat membuka jalan untuk memperoleh informasi,

dukungan, dan kesempatan tertentu yang dapat memudahkan individu saat menjalani proses seleksi. Oleh karena itu, kapital sosial bisa dianggap sebagai salah satu sumber daya sosial yang berperan signifikan dalam memengaruhi kesempatan individu dalam rekrutmen anggota kepolisian.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa kapital sosial memiliki peranan yang signifikan dalam memengaruhi kemungkinan individu dalam tahap pemilihan anggota kepolisian. Kapital sosial mampu memberikan akses terhadap informasi, bantuan, serta kesempatan tertentu yang dapat mendukung individu saat melalui proses seleksi. Oleh karena itu, kajian tentang kapital sosial para peserta seleksi anggota kepolisian sangat penting untuk memahami bagaimana kapital sosial diperoleh, digunakan, dan berkontribusi dalam memengaruhi peluang individu dalam proses tersebut.

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan studi sosiologi, terutama dalam memahami fungsi kapital sosial dalam konteks pemilihan institusi formal negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika sosial yang muncul dalam proses pemilihan anggota kepolisian, serta berkontribusi dalam memahami keterkaitan antara kapital sosial dan mobilitas sosial dalam masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas, Maka Peneliti Merumuskan beberapa pertanyaan diantaranya adalah :

1. Bentuk-bentuk Kapital Sosial apa yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh peserta dalam mengikuti seleksi calon polisi?
2. Bagaimana Kapital Sosial berperan dalam memberikan akses,dukungan,atau peluang yang berbeda bagi calon peserta seleksi?
3. Bagaimana proses perebutan kesempatan (kompetisi sosial) terjadi di antara peserta seleksi calon polisi yang berasal dari latar sosial berbeda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban mengenai rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengenali dan mempelajari jenis-jenis kapital sosial yang dimiliki dan digunakan oleh peserta saat mengikuti proses seleksi calon anggota Kepolisian Republik Indonesia di Cipinang, Jakarta Timur.
2. Untuk menganalisis peran kapital sosial dalam memberikan akses, dukungan, dan peluang yang berbeda bagi peserta seleksi yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam.
3. Untuk menjelaskan dinamika perebutan kesempatan dalam proses seleksi calon polisi sebagai arena kompetisi sosial yang dipengaruhi oleh kapital sosial antar peserta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu sosiologi, terutama dalam kajian sosiologi pendidikan dan sosiologi profesi. Penelitian ini menghadirkan analisis empiris yang memperlihatkan bagaimana modal sosial berfungsi sebagai mekanisme distribusi peluang di dalam arena seleksi calon anggota kepolisian. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Pierre Bourdieu (1986), penelitian ini memperdalam pemahaman tentang keterkaitan antara modal sosial, arena kompetitif, serta habitus individu dalam menghasilkan hasil-hasil sosial tertentu.

Kajian ini juga memperluas penerapan teori Bourdieu ke dalam konteks masyarakat urban Indonesia, di mana hubungan sosial, patronase, dan jaringan informal sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang dalam mengakses posisi sosial strategis. Oleh karena itu, penelitian ini berpotensi memperkaya wacana akademik mengenai peran modal sosial dalam proses reproduksi ketimpangan sosial dan mobilitas vertikal di ruang

sosial yang tampak meritokratis, tetapi sebenarnya sarat dengan logika sosial yang hierarkis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan reformasi terhadap sistem rekrutmen agar lebih transparan, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap pengaruh modal sosial dalam proses seleksi, serta membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang secara tidak langsung muncul dalam mekanisme rekrutmen.

Selain itu, penelitian ini juga memberi manfaat bagi masyarakat luas, terutama kalangan muda, untuk memahami pentingnya membangun jejaring sosial yang positif dan berbasis kepercayaan, bukan sekadar mengandalkan koneksi elitis yang bersifat eksklusif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun sistem seleksi yang lebih berorientasi pada prinsip meritokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan kesempatan, sekaligus memperkuat nilai integritas dalam lembaga kepolisian dan masyarakat secara umum.

3. Manfaat Stake Holder

Penelitian ini berguna bagi:

Institut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Penelitian ini memiliki manfaat penting bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem rekrutmen calon anggota Polri agar lebih transparan, adil, serta berpijak pada prinsip meritokrasi. Melalui hasil temuan yang menunjukkan peran signifikan modal sosial dalam proses seleksi, Polri dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa faktor hubungan sosial dan jaringan informal sering kali memengaruhi keberhasilan peserta seleksi. Oleh karena itu,

penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat pelaksanaan seleksi yang berbasis kompetensi dan menekan praktik-praktik nonformal yang berpotensi merusak integritas lembaga. Di samping itu, penelitian ini turut berkontribusi dalam membangun citra Polri sebagai institusi profesional yang menjunjung tinggi nilai keadilan, inklusivitas, serta kepercayaan publik.

Generasi Anak muda Penelitian ini memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat, terutama bagi kalangan muda di kawasan urban seperti Cipinang, Jakarta Timur. Melalui hasil penelitian ini, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya membangun modal sosial yang konstruktif yakni jaringan sosial yang didasarkan pada nilai kepercayaan, kerja sama, dan integritas bukan semata-mata bergantung pada hubungan patronase atau koneksi elitis. Kesadaran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat dan adil, sekaligus membentuk karakter sosial yang mandiri, jujur, dan beretika. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong anak muda untuk berpikir kritis terhadap struktur sosial yang ada dan berperan aktif dalam memperjuangkan kesetaraan kesempatan di lingkungan sosial mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I ini menyajikan latar belakang studi yang menguraikan fenomena sosial yang berkaitan dengan fungsi kapital sosial dalam seleksi calon anggota polisi di Cipinang, Jakarta Timur. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai panduan umum tentang alur pembahasan skripsi.

Bab II ini mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti, kerangka konseptual, serta tinjauan teori yang dijadikan dasar bagi analisis. Teori inti yang diterapkan dalam studi ini adalah teori modal sosial karya Pierre Bourdieu dan teori pertukaran sosial dari James Coleman, yang berfungsi untuk memahami peran jaringan sosial, hubungan,

dan distribusi peluang dalam proses pemilihan calon polisi. Bab ini juga dilengkapi dengan kerangka pemikiran yang mengaitkan konsep-konsep teoretis dengan fokus penelitian.

Bab III ini menguraikan metode serta tipe penelitian yang diterapkan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sosiologis yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fungsi kapital sosial dalam proses pemilihan calon anggota kepolisian di Cipinang, Jakarta Timur. Selain itu, bab ini juga menjelaskan lokasi dan subjek penelitian yang ditentukan secara purposif sesuai dengan tujuan penelitian, serta teknik pengumpulan data yang mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang menyeluruh. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta penerapan etika penelitian yang mencakup persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan integritas ilmiah selama proses penelitian.

Bab IV ini menyajikan temuan dari riset yang diperoleh dari data lapangan, termasuk gambaran umum mengenai tempat penelitian, ciri-ciri informan, serta hasil utama berkaitan dengan jenis-jenis kapital sosial yang dimiliki oleh peserta seleksi calon polisi di Cipinang. Selanjutnya, bab ini mengulas fungsi kapital sosial dalam persaingan untuk mendapatkan peluang dan dinamika kompetisi di antara peserta seleksi dengan menghubungkan hasil empiris dan teori yang diterapkan, khususnya teori modal sosial oleh Pierre Bourdieu dan James Coleman.

Bab V ini menyajikan ringkasan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Di samping itu, bab ini juga memberikan rekomendasi akademis dan praktis yang ditujukan untuk pengembangan studi sosiologi, lembaga Kepolisian Republik Indonesia, serta masyarakat, terutama generasi muda yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi calon anggota kepolisian.